

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan merupakan hal yang tidak asing. Banyak perusahaan berlomba-lomba dalam mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu untuk menjadi lebih baik dan menjadi pusat dalam industrinya seiring dengan perjalanan waktu. Adanya faktor ketidakpastian terjadinya risiko merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Risiko merupakan suatu akibat, konsekuensi serta bahaya yang terjadi, sedang terjadi atau terjadi dimasa mendatang akibat sebuah proses. Saat ini, berbagai profil risiko yang dihadapi perusahaan berbeda dengan profil risiko pada dekade sebelumnya (Beasley, 2007). Dengan sifatnya yang menghadang dan menghalangi tercapainya suatu tujuan serta ketidakpastian terjadinya risiko, berbagai cara ditempuh oleh perusahaan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Salah satunya yakni unsur penerapan dari *good corporate governance* (GCG) tentang bagaimana mengelola sebuah resiko yang dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan.

Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima (Pratika, 2011). Kerugian atau bahkan kebangkrutan merupakan akibat terburuk dari risiko yang tidak dikelola

oleh perusahaan secara baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem manajemen risiko yang efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan melindungi reputasi perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009).

Dalam ajaran agama Islam, sistem manajemen risiko juga telah dituangkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, yang bersabda:

﴿إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمُضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتَهُ﴾
رواه ابن المبارك

Artinya : “jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan itu baik, ambilah maka jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR Ibnu Mubarak)

Selain hadits diatas, Allah SWT juga telah berfirman yang dituangkan dalam surah Al-Luqman ayat 34:

Artinya : “...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok...” (QS. Al-Luqman: 34).

Maka dari itu, untuk dapat memperkecil terjadinya sebuah risiko dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengawasi serta memberikan

perhatian penuh terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu perusahaan.

Para pemakai laporan keuangan baik tingkat manajemen, para pemilik atau pemegang saham, para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lainnya serta kreditur memerlukan informasi keuangan yang disediakan dan dikendalikan oleh manajemen risiko (Ramadhani, dkk 2015). Selain itu, manajemen risiko juga memberi perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap fatalnya akibat yang mungkin terjadi karena adanya risiko (Susilo dan Kaho, 2010 dalam Setyarini, 2011).

Adanya aspek pengawasan yang dilakukan oleh sistem manajemen risiko merupakan kunci utama agar operasional dapat berjalan dengan efektif. Selain terjadinya peristiwa skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan ternama yakni perusahaan *Enron* dan *Worldcom* sekitar tahun 2000-an juga menyadarkan perusahaan khususnya dewan komisaris untuk berinisiatif membentuk suatu komite yang berfungsi melakukan pengawasan dan manajemen resiko yang disebut *risk management committee* (RMC). RMC merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan oleh dewan direksi (Subramaniam *et al.*, 2009; Yatim, 2009; Blanchard dan Dionne, 2003). Selain membentuk RMC, dewan komisaris juga membentuk beberapa komite diantaranya adalah komite audit, komite nominasi dan komite remunerasi.

Risk management committee (RMC) didefinisikan sebagai sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level dewan komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Adanya pembentukan RMC tersebut diharapkan dapat meringankan beban dan tanggung jawab dari dewan komisaris agar fungsi dewan komisaris dapat berjalan dengan efektif.

Keberadaan RMC memiliki hubungan dengan ukuran dewan komisaris. Menurut Subramaniam *et al.*, (2009), RMC merupakan komite baru yang dibentuk oleh dewan komisaris yang dipengaruhi oleh ukuran dewan dalam memberikan kesempatan yang besar untuk mencari sumber daya yang ditujukan untuk manajemen risiko. Oleh karena itu, RMC cenderung akan dibentuk oleh perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar. Hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan keberadaan RMC telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Januuarti (2010), Kuncoro (2013), dan Subramaniam *et al.*, (2009)

Agar aktifitas jalannya perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan pengawasan dari luar perusahaan agar kualitas independennya terjaga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Pengawasan dari luar tersebut akan

dilakukan oleh dewan komisaris independen. Tingginya tingkat proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk dilakukannya pengawasan yang lebih tinggi pada aktivitas manajemen risiko (Yatim, 2009). Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen akan diukur dengan menggunakan konsep *two tier system* yang terdapat dalam *framework* pengelolaan korporasi pada GCG, yakni pemisahan antara tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dengan tugas pelaksanaan oleh dewan direksi. Hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan keberadaan RMC telah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Chen *et al.*, (2009), Yatim (2009) dan Andarini dan Januarti (2010).

Selain itu, agar mendapatkan pengetahuan serta pemahaman dan memberikan kesempatan kepada para manajer dan fungsi pengendalian lainnya untuk bertukar pendapat, maka dibutuhkan pertemuan atau rapat antar dewan komisaris. Melalui rapat, dewan komisaris juga mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan yang relevan, tepat waktu secara seimbang. Dezoort *et al.*, (2002) dalam Sutaryo *et al.*, (2011) menjelaskan bahwa tingginya frekuensi rapat dewan komisaris yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas audit eksternal serta meminimalkan insiden masalah pada pelaporan keuangan. Hubungan frekuensi rapat dewan komisaris dengan keberadaan RMC telah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Subramaniam *et al.*, (2009), Kuncoro, (2013) dan Hanifah, (2013).

Reputasi auditor berdampak terhadap keberhasilan perusahaan. Reputasi auditor yang baik dapat ditunjukkan dengan menggunakan KAP yang masuk dalam kelompok *big four*. Kualitas audit yang berasal dari KAP dalam kelompok *big four* tersebut telah banyak mendapatkan kepercayaan oleh perusahaan. Reputasi auditor dengan keberadaan RMC telah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Chen *et al.*, (2009) dan Pratika (2011).

Segmen bisnis suatu perusahaan memiliki dampak pada kompleksitas bisnis perusahaan. Hal serupa juga dikatakan oleh Subramaniam *et al.*, (2009) yang berpendapat bahwa semakin banyak segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan maka berbanding lurus dengan tingkat kompleksitas bisnis. Jika kompleksitas bisnis yang terdapat pada perusahaan itu tinggi, maka risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan juga semakin tinggi (Setyarini, 2011). Salah satu hal ini lah mungkin menyebabkan perusahaan yang mempunyai risiko tinggi karena memiliki jumlah segmen bisnis yang banyak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yatim (2009) ditemukan bahwa kompleksitas bisnis berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam *et al.*, (2009), Andraini dan Januarti (2010), dan Setyarini (2011).

Koroses dan Horvat, (2005) dalam Subramaniam *et al.*, (2009) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi aset piutang usaha yang tinggi akan memperketat pengawasan risiko dan berdampak terhadap

keberadaan RMC. Hal ini dikarenakan risiko pelaporan keuangan yang akan dihadapi pun semakin tinggi yang disebabkan karena tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Dyaksa (2012) menjelaskan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratika (2011) dan Setyarini (2011).

Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam menggunakan hutang maka dibutuhkan rasio *leverage* (Setyarini, 2011). Jika rasio *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan juga semakin tinggi (Subramaniam *et al.*, 2009). Dengan adanya peluang besar terjadinya risiko tersebut maka mendorong perusahaan untuk membentuk RMC. Penelitian yang dilakukan Andarini dan Januarti (2010) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berdampak terhadap keberadaan RMC. Hasil penelitian tersebut juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam *et al.*, (2009). Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istorini dan Handoyo (2014).

Selain itu, pembentukan komite baru juga berdampak pada ukuran perusahaan (Chenet *al.*, 2009). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat menentukan ukuran perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). Ukuran perusahaan yang besar mendorong dewan komisaris untuk membentuk RMC karena risiko yang mungkin terjadi juga besar. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010), serta Istorini dan Handoyo (2014) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan RMC.

Di beberapa perusahaan, tugas pengawasan resiko masih diberikan kepada komite audit (Krus & Orowitz, 2009 dalam Istorini dan Handoyo, 2014). Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 menyatakan salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit berkaitan dengan manajemen risiko dan kontrol yakni mengawasi proses manajemen risiko dan mengendalikan perusahaan (Kuncoro,2013).

Namun, terdapat beberapa pendapat yang menunjukkan adanya keraguan bahwa komite audit dapat menyediakan sebuah manajemen risiko yang efektif (Zaman, 2001 dalam Yatim, 2009; Krus dan Orowitz, 2009 dalam Wulandari, 2012). Salah satunya diakibatkan karena untuk mengetahui seluruh risiko yang terkait dengan perusahaan, dibutuhkan pemahaman yang cukup, kemampuan yang memadai serta fasilitas yang menunjang yang terkait dengan kegiatan operasi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, luasnya tanggung jawab dan tugas komite audit yang semakin berat, semakin menimbulkan keraguan mengenai kemampuannya untuk berfungsi secara efektif (Bates & Leclerc, 2009 dalam Istorini dan Handoyo, 2014). Oleh karena pentingnya pengawasan risiko dan terjadinya risiko yang berbagai macam dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan, maka dibentuklah

Risk Management Committee (RMC) yang hanya berfokus pada pengawasan risiko.

Di Indonesia, keberadaan RMC mulai menunjukkan perkembangannya. Pemerintah mulai memadatkan pembentukan RMC sebagai komite pengawas risiko pada industri perbankan yang lebih dikenal dengan komite pemantau risiko (KPR), dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang berisikan tentang salah satu penerapan *good corporate governance* untuk bank umum yang bersifat suatu kewajiban. Namun, berbeda dari industri perbankan dan *financial* yang diregulasi secara ketat, pembentukan RMC pada sektor industri lainnya di Indonesia masih bersifat sukarela (Andarini dan Januarti, 2010). Terjadinya ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan serta tidak adanya regulasi yang mewajibkan pembentukan komite risiko maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis hubungan karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan *risk management committee* (RMC).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andarini dan Januarti (2010) yang menguji hubungan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan *go public* Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang terdiri dari komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage* dan

ukuran perusahaan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian Andarini dan Januarti (2010). Namun, dilakukan modifikasi, penambahan dan eliminasi dari peneliti terdahulu.

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yakni karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan. Untuk karakteristik dewan komisaris, digunakan variabel ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris Independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Sedangkan karakteristik perusahaan akan menggunakan variabel reputasi auditor, kompleksitas bisnis, risiko pelaporan keuangan dan *leverage*. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menambahkan satu variabel baru dari penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010). Variabel yang ditambahkan tersebut adalah variabel frekuensi rapat dewan komisaris. Penambahan variabel frekuensi rapat dewan komisaris pada penelitian ini karena semakin tinggi frekuensi rapat maka dapat menghasilkan monitoring yang lebih baik (Setyarini, 2012).

Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) terletak pada objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini objek yang akan digunakan adalah perusahaan *non financial* yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan *annual report* pada tahun 2013-2015.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen. Untuk variabel karakteristik dewan komisaris, variabel yang akan digunakan yakni proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Sedangkan karakteristik perusahaan variabel yang akan digunakan yakni reputasi auditor, kompleksitas bisnis, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang ada pada penelitian ini. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
5. Apakah kompleksitas berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?

6. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?
7. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta memberikan bukti empiris :

1. Ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.
2. Proporsi dewan komisaris independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.
3. Frekuensi rapat dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.
4. Reputasi auditor yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC.
5. Risiko pelaporan keuangan yang berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.
6. Kompleksitas bisnis yang berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.
7. *Leverage* yang berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Dalam bidang pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan, ide, atau kontribusi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan hubungan dan pengaruh RMC.
2. Dalam bidang praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditor atau investor dalam pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan untuk perusahaan agar memiliki kualitas pengawasan manajemen resiko yang baik dengan dibentuknya RMC.